

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu perusahaan yang menyajikan laporan keuangan hanya menjelaskan adanya tingkat keberhasilan ekonomi tanpa menjelaskan secara rinci bahwa terdapat juga dampak sosial, dan lingkungan yang disebabkan (Suhardiyah dan Khotimah, 2018). Laporan keuangan sebagai satu dari sekian banyak sumber informasi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini pemegang saham dalam menilai kinerja keuangan perusahaan serta sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Penyusunan laporan keuangan dalam suatu perusahaan memiliki tujuan untuk mengetahui keuntungan maupun kerugian yang disertai tingkat risiko yang ada (Aziz, 2014). Oleh karena laporan keuangan berisi mengenai seluruh keuangan perusahaan, maka diperlukan adanya suatu laporan yakni laporan keberlanjutan yang menjelaskan secara garis besar dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan, sehingga dapat menjadi acuan bagi para pengambil keputusan (Pratama & Yulianto, 2015).

Laporan keberlanjutan telah menjadi suatu laporan yang penting dalam agenda perusahaan pada beberapa negara di belahan dunia. Namun sebagian organisasi bisnis atau perusahaan ada juga yang tidak melakukan penyusunan laporan keberlanjutan mengingat laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela (Kend, 2015). Di Indonesia sendiri, belum ada standar akuntansi keuangan bagi perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan, sehingga perusahaan dengan sukarela menerbitkan laporan tersebut Anggaraini (2006, dalam Reni, Anggraini & Retno, 2015). Tujuan dari penyusunan laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh suatu perusahaan bukanlah bagian dari etika perusahaan tetapi lebih untuk mendapatkan keunggulan dalam bersaing (Finch, 2005). Tang dan Chan (2010, dalam Burns Weston, 2015) menyatakan bahwa laporan keberlanjutan adalah laporan yang mengukur dan mengungkapkan dampak

ekonomi, sosial dan lingkungan organisasi terhadap masyarakat serta bertanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan atas kinerja organisasi menuju tujuan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini fenomena terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia telah mendapat perhatian oleh beberapa pihak. Hal itu ditandai dengan adanya konferensi PBB tahun 1962 yang membahas kerusakan lingkungan serta membuat suatu kesepakatan untuk melindungi dan meningkatkan mutu lingkungan demi kelangsungan hidup manusia Saifullah (2013, dalam Situmorang dan Hadiprajitno 2016). Kesepakatan yang dihasilkan tersebut dijadikan gagasan untuk pembangunan berkelanjutan dengan tujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan perusahaan memerlukan kerangka global yang disertai suatu ukuran dan tujuan yang jelas agar dapat dipahami dengan mudah. Konsep tersebut kemudian disebut dengan laporan keberlanjutan (Situmorang, dkk., 2016).

Sepuluh tahun terakhir ini, trend laporan keberlanjutan di Indonesia mulai mendapat perhatian dari pemangku kepentingan, investor, pemerintah, masyarakat serta kreditur, karena perusahaan cenderung mengabaikan dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan tersebut. Minimnya tingkat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan digambarkan dengan maraknya kasus kerusakan lingkungan yang terjadi (Barung, Simanjuntak, dan Hutadjulu, 2018). Perusahaan seolah-olah tidak mepedulikan kerusakan lingkungan, sehingga masyarakat yang harus menanggung akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Maka laporan keberlanjutan diharapkan sebagai acuan bagi perusahaan agar tidak hanya berfokus pada keuntungan yang besar tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi, namun memulai kegiatan yang bermanfaat juga bagi lingkungan dan sosial.

Laporan keberlanjutan yang diterbitkan perusahaan memiliki kaitan dengan teori keagenan. Seperti yang dijabarkan oleh Situmorang, dkk., (2016) teori keagenan menjelaskan bahwa dalam perusahaan terdapat hubungan *principal* dan *agent* yang ada, jika diantara keduanya ada yang menyewa pihak lain agar bekerja memenuhi kepentingannya dan mengambil keputusan. Pada umumnya pihak *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) akan mementingkan diri sendiri, sehingga menimbulkan biaya maupun masalah keagenan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah menunjuk sebuah dewan pengawas untuk memantau tindakan manajer dan mendorong manajer membuat suatu laporan yang berkelanjutan (Shamil, 2014; dalam Situmorang, dkk., 2016). Teori keagenan berkaitan dengan laporan keberlanjutan, dimana manajer akan memberi informasi pada *principal* mengenai laporan keberlanjutan perusahaan dimasa yang akan datang namun tetap meninjau aktivitas perusahaan. Oleh karena hal tersebut, maka biaya keagenan akan lebih kecil dengan adanya pantauan internal yang efektif (Octoviany, 2020).

Laporan keberlanjutan dijadikan sarana pelaporan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan keberlanjutan dengan cara mengukur, serta menjabarkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara transparan (GRI, 2016). Sejumlah perusahaan di Indonesia saat ini, sudah banyak memberikan informasi mengenai laporan keberlanjutan yang dimana membahas informasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penerbitan laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela, sehingga sebanyak 120 perusahaan pada akhir tahun 2016 telah menerbitkan laporan keberlanjutan, oleh karena laporan keberlanjutan memberikan informasi mengenai non keuangan, dalam hal ini, akuntan-akuntan mulai menyadari bahwa pentingnya penyusunan laporan keberlanjutan berisi standar dan prinsip yang mencerminkan keseluruhan aktivitas perusahaan yang memiliki perbedaan dengan apa yang tertuang dalam laporan keuangan (Suhardiyah, dkk, 2018). Sehingga membantu pihak eksternal untuk melihat secara transparan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam suatu perusahaan.

Umumnya pengambilan keputusan dilakukan oleh pemegang saham guna mendorong kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan (Nilawati, Andini, dan Santoso, 2018). Apabila didalam perusahaan terdapat satu atau sebagian kecil individu, yang memiliki sebagian besar saham yang ada, maka dalam perusahaan tersebut terdapat konsentrasi kepemilikan (Waryanto, 2010; dalam Barung, dkk., 2018). Perusahaan yang memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi dapat mendorong perusahaannya untuk membuat laporan keberlanjutan karena terdapat proses pemantauan yang baik dari pihak pemegang saham serta mampu meminimalisir peluang manajemen untuk menyembunyikan informasi (tidak transparan) (Barung, dkk., 2018). Oleh karena itu, saat ini perusahaan Indonesia semakin sadar untuk terus melakukan perubahan dalam penyusunan laporan keuangan termasuk laporan keberlanjutan. Dimana investor atau pihak eksternal perusahaan akan melihat apakah perusahaan tersebut sudah melakukan pengungkapan laporan secara maksimal atau tidak. Hal ini kemudian perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan untuk mendukung citra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pihak investor agar terus melakukan penanaman modal demi mendukung pertumbuhan perusahaan. Pemegang saham juga akan menuntut perusahaan untuk mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Hamudiana & achmad, 2018).

Keseimbangan kepentingan *stakeholders* serta kepatuhan pada norma yang berlaku atas kegiatan yang dilakukan, menjadi tuntutan bagi perusahaan dalam menerapkan mekanisme tata kelola yang baik, sehingga perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata (Adila & Syofyan, 2016). Tata kelola perusahaan yang baik mengharuskan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan secara terus menerus. Dewan Komisaris sebagai dewan yang bertanggung jawab atas perusahaan secara bersama-sama bertanggung jawab untuk memonitor dan memantau kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan baik. Selain itu, tugas lain dari dewan komisaris adalah untuk melindungi tujuan dari pemegang saham, sehingga meningkatkan kepercayaan pemegang saham (Thesarani, 2017).

Komite audit menjadi kunci utama dari dewan, manajemen dan pengawasan auditor (Malau, 2017). Komite audit merupakan badan yang dibentuk dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang berjumlah 3 orang dari pihak luar maupun komisaris independen untuk membantu pemeriksaan terhadap direksi dalam mengelola perusahaan (Wiratama, 2013). Adanya komite audit dalam perusahaan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan investor pemegang saham, karena dapat meningkatkan kepercayaan. Apabila kinerja komite audit optimal maka akan mendukung tata kelola perusahaan menjadi baik, sehingga tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi tentunya akan meningkat. Selain itu, komite audit juga dapat menjadi pemicu bagi perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan yang lengkap dengan integritas tinggi (Mulyadi, 2002; dalam Putri & Sari, 2014). Menurut Waryanto (2010, dalam Putri & Sari, 2014) komite audit juga berperan menjamin kualitas dari laporan keberlanjutan dan mengawasi *system* pengendalian perusahaan agar dapat berjalan lancar melalui aktivitas kontrol internal yang memadai. Hal tersebut juga terkait dengan *agency theory* yakni komite audit berperan mengawasi manajer sehingga manajer tidak mementingkan diri sendiri atau bersifat oportunistik (Daljono, 2013).

Kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu upaya mengurangi konflik agensi atau konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, dimana semakin besar kepemilikan manajerial maka konflik yang terjadi juga makin kecil, dikarenakan pemilik juga berperan sebagai pengelola perusahaan sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan (Sedana, dkk., 2013). Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang diperoleh dari manajemen perusahaan (Istant, 2008; dalam Kusumastuti, Setiawati, dan Bawono, 2017). Sedangkan menurut Pujiati dan Widanar (2009, dalam Sedana, dkk., 2013) Kepemilikan manajerial adalah manajemen perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham dan dapat diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki. Kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat memberikan hasil yang lebih besar sehingga perusahaan dan kepemilikan manajerial cenderung mengejar tingkat hutang agar lebih tinggi. Kekayaan pemegang saham memiliki kaitan yang erat dengan keuangan yang memperbaiki tata kelola yang ada dalam

perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki maka manajer akan terpacu untuk berusaha memberi keuntungan bagi perusahaan, dengan cara mengungkapkan laporan keberlanjutan yang berkualitas baik. (Aniktia dan Khafid, 2015).

Pengawasan dalam perusahaan merupakan bagian yang terpenting agar tiap kegiatan perusahaan dapat di kontrol sehingga aktivitas perusahaan berjalan dengan baik dan mencegah timbulnya konflik. Dewan komisaris merupakan salah satu badan yang mempunyai otoritas untuk mengawasi para direksi. Menurut Rudyanto & Veronica (2016), dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada manajer agar bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab. Dalam perusahaan sering terjadi konflik keagenan dan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer agar memberi keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan sangat dibutuhkan (Sedana, dkk., 2013). Pengawasan harus dilakukan dewan komisaris dengan maksimal dan secara efektif, agar dapat menekan manajer untuk memberikan informasi akurat agar kualitas laporan keberlanjutan perusahaan semakin luas dan diakui kebenarannya (Barung, dkk., 2018).

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan dan pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang diukur dari indikator komite audit, kepemilikan manajerial, serta jumlah dewan komisaris terhadap kualitas laporan keberlanjutan periode 2015-2019. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2015-2019. Periode tersebut dipilih oleh penulis karena penulis mau membandingkan saat pertama kali SRI (*Sustainability Reporting Index*) dicetuskan pada tahun 2013 serta ingin melihat pembaharuan penelitian tahun terdahulu antara tahun 2015 hingga 2019. Perusahaan yang *go public* harus melaporkan laporan keuangan secara transparan dalam pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan lingkungan, oleh sebab itu penulis menggunakan perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan, sehingga kemudian mendorong perusahaan agar melaporkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat agar memicu perusahaan untuk melakukan laporan keberlanjutan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memperkuat penelitian sebelumnya terkait kualitas laporan keberlanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan yang tercatat di BEI periode 2015-2019?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan yang tercatat di BEI periode 2015-2019 ?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan yang tercatat di BEI perioded 2015-2019?
4. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan yang tercatat di BEI perioded 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh konsentrasi kepemilikan dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kualitas laporan keberlanjutan dilakukan dengan tujuan untuk menguji :

1. Pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan.
2. Pengaruh komite audit terhadap kualitas laporan keberlanjutan.
3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas laporan keberlanjutan.
4. Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan , yakni :

1. Manfaat Akademik

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bisa menambah penelitian mengenai laporan keberlanjutan serta dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat mempengaruhi perusahaan lainnya agar terdorong untuk mempublikasikan laporan keberlanjutan perusahaannya.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan rerangka penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan, dan analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan terdiri dari karakteristik obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis dan pembahasan data penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan, keterbatasan dan saran sterdiri dari kesimpulan hasil penelitian,

keterbatasan dan saran bagi penelitian selanjutnya.